

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi tidak pernah lepas dari kondisi investasi di suatu negara yang memiliki hubungan erat dengan pasar modal. Dengan adanya pasar modal, memungkinkan suatu perusahaan memperoleh dana dari seorang investor. Perusahaan akan memperoleh modal dari investasi dana yang diberikan oleh investor sehingga perusahaan tersebut mampu mencapai tujuannya. Namun, dalam praktiknya seringkali perusahaan yang telah melakukan operasi dalam jangka waktu tertentu terpaksa bubar karena mengalami *financial distress* yang pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan (Rismawaty, 2012). *Financial Distress* merupakan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang mengalami krisis ekonomi, yang mana disisi lain perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya saat jatuh tempo. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan sebaiknya melakukan analisis dan prediksi mulai sejak dini agar bisa memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Menurut Hatianah (2017) *financial distress* dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal perusahaan. Faktor internal yang bisa menyebabkan terjadinya *financial distress* adalah arus kas, besarnya jumlah hutang perusahaan, tata kelola

perusahaan yang buruk, dan kerugian yang dialami perusahaan dalam menjalankan operasional selama beberapa tahun. Sedangkan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi terjadinya *financial distress* lebih bersifat makroekonomi yang dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung, seperti kenaikan indeks harga saham gabungan, inflasi, dan nilai tukar rupiah.

Salah satu contoh kasus perusahaan manufaktur di BEI yang mengalami *delisting* adalah PT. DAVO Tbk. Perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang makanan ini telah efektif di *delisting* sejak tanggal 21 Januari 2015 oleh BEI. Perseroan ini diketahui telah di suspensi sahamnya sejak 09 Maret 2012 di seluruh pasar yang disebabkan oleh kegagalan dalam membayar kupon obligasi. Perseroan saat itu belum membayar kupon obligasi dolar yang jatuh tempo pada tanggal 07 Maret 2012. Adapun proses gagal membayar hutang tersebut terjadilah kasus *default* perseroan yang terancam krisis ekonomi secara global. Obligasi perseroan senilai USD 198 juta tersebut diketahui saat jatuh tempo pada tahun 2014 dengan jumlah kupon sebesar 11 persen. (*Sumber: Metronews.com*).

Good Corporate Governance di dalam sebuah perusahaan adalah sesuatu yang wajib untuk diterapkan oleh setiap perusahaan. Perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik, maka perusahaan tersebut dalam kondisi sehat dan semakin besar. Apabila perusahaan gagal dalam mengatasi kesulitan keuangan bisa dikatakan bahwa perusahaan

tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang buruk. Kondisi *financial* yang buruk dapat menyebabkan kesulitan bagi perusahaan.

Andina (2016:135) mengatakan *corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisien ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006:8) menjelaskan untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi, sehingga diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*value*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Selain itu, juga ada beberapa cara untuk mencegah perusahaan dalam menghadapi kondisi *financial distress*, salah satunya adalah mekanisme *corporate governance* yang baik. Mekanisme *corporate governance* dapat diukur melalui komisaris independen, komite audit, dan struktural kepemilikan yang dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Dengan adanya mekanisme *good corporate governance* yang baik dapat membantu mengurangi resiko perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* atau kesulitan keuangan. Menurut Monks (2003) dalam Kaihatu (2006:2) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* secara definisi merupakan sistem

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan untuk semua *stakeholder* ada dua konsep yang ditetapkan, yang pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan yang kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang baik dalam perusahaan. Anggita (2017: 107) mengatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen yang lebih besar maka akan memiliki *corporate governance* yang baik. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang bertindak secara independen dan tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, serta dewan komisaris lainnya. Berdasarkan teori *agency* yang disebut dengan *agency problem*. Komisaris independen ini, dapat menghindari *asymmetric information* yang terjadi antara kedua belah pihak yang dapat menyebabkan terjadinya *financial distress*. Maka dari itu keberadaan komisaris independen sangat diperlukan untuk mengawasi dewan direksi dalam mengontrol mengenai masalah keuangan perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Andina *et al.* (2016) dan Neldawati (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Komite audit adalah anggota yang dibentuk oleh dewan komisaris yang diasumsikan mampu mengurangi masalah keagenan yang terjadi di dalam perusahaan. Komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan, dan penjelasannya. Irsyad (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan dalam memprediksi kondisi *financial distress*, karena jumlah komite audit yang semakin tinggi akan sangat berpengaruh pada semakin rendahnya suatu perusahaan akan mengalami *financial distress*. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Savera (2018) bahwa komite audit tidak berpengaruh dalam memprediksi kondisi *financial distress*, karena semakin banyak anggota komite audit terkadang malah menyulitkan kesepakatan keputusan dalam melakukan kinerja. Keberadaan komite audit di perusahaan mungkin hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan dari Surat Keputusan Bapepam Nomor 29 tahun 2004 yang harus dipenuhi perusahaan *go-public*.

Struktur kepemilikan perusahaan dikelompokkan menjadi dua macam diantaranya kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Menurut Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa dengan adanya manajer yang memiliki porsi saham dapat menyelaraskan dua kepentingan yaitu kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham. Adanya pemegang saham manajerial (*agency*) diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi karena seorang manajer yang juga berperan sebagai pemilik perusahaan (*principal*) akan berusaha untuk

memaksimalkan kinerjanya dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya *financial distress*. Hal ini dapat dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Andina *et al.*(2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kondisi terjadinya *financial distress*.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh intitusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya dari semua saham yang beredar di dalam perusahaan tersebut. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa kepemilikan institusi memiliki peran yang penting dalam mengurangi adanya masalah keagenan yang terjadi diantara manajer dengan pemilik perusahaan. Investor institusi dianggap dapat mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja seorang manajer sebagai pengelola perusahaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimalisir adanya *financial distress*. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian Savera *et al.*(2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Selain mekanisme *corporate governance*, ukuran perusahaan (*firm size*) sebenarnya dapat menggambarkan seberapa besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Rajan dan Zingales,1995 (dalam Supriyanto dan Falikhatun, 2008), perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan mudah melakukan diversifikasi dan cenderung lebih kecil tingkat mengalami kebangkrutan atau (*financial distress*). Pendapat ini

didukung oleh penelitian yang dilakukan Ni Ketut *et al.*(2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *financial distress*.

Telah banyak dilakukan penelitian mengenai macam-macam mekanisme *corporate governance* dan size perusahaan yang berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan. Meskipun demikian, masih terjadi ketidakpastian dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Dimana pada suatu penelitian yang lain. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan sampel, populasi yang diteliti, industry perusahaan, dan waktu penelitian. Permasalahan ini yang *research gap* dalam penelitian ini.

Alasan penulis memilih perusahaan property dan real estate yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, karena perusahaan ini memiliki karakteristik yang susah diprediksi dan memiliki risiko tinggi. Ni Ketut *et al.*(2015:902) mengatakan bahwa perusahaan *property* dan *real estate* sering mengalami pasang surut, apabila kondisi pertumbuhan ekonomi meningkat maka perusahaan tersebut akan *booming* dan cenderung akan melakukan suplai yang banyak. Namun jika kondisi pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka perusahaan akan mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal seperti inilah yang menyebabkan perusahaan *property* dan *real estate* sulit diprediksi. Sumber pendanaan yang utama perusahaan *property* dan *real estate* pada umumnya diperoleh dari kredit perbankan, sedangkan melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan aset berupa tanah dan bangunan. Hal inilah yang dapat menyebabkan perusahaan

property dan *real estate* cenderung memiliki risiko yang tinggi. Meskipun tanah dan bangunan dapat digunakan untuk membayar utang namun aset tersebut memerlukan waktu yang lama untuk mengubahnya menjadi kas, sehingga banyak *developer* yang tidak mampu membayar kewajibannya saat jatuh tempo.

Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan perusahaan *property* dan *real estate* sebagai objek yang akan diteliti. Maka dari itu peneliti akan mengambil objek penelitian yaitu, perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan menggunakan variabel : Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan *Firm Size* sebagai faktor yang mempengaruhi *Financial Distress*. Maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Firm Size* Dalam Memprediksi *Financial Distress*” (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018).

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap *financial distress* perusahaan. Dengan demikian, perusahaan bisa menganalisis dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan sehingga manajemen dan semua pihak yang terkait

dapat mengambil keputusan yang bijak dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018 ?
2. Apakah komite audit berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018 ?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018 ?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018 ?
5. Apakah *firm size* berpengaruh dalam memprediksi *financial* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh dari dewan komisaris independen dalam memprediksi *financial distress* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018.
2. Menganalisis pengaruh dari komite audit dalam memprediksi *financial distress* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018.
3. Menganalisis pengaruh dari kepemilikan manajerial dalam memprediksi *financial distress* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018.
4. Menganalisis pengaruh dari kepemilikan instutional dalam memprediksi *financial distress* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018.
5. Menganalisis pengaruh dari *firm size* dalam memprediksi *financial distress* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang *financial distress*, khususnya terkait dengan pengaruh *good corporate governance* dan *firm size* perusahaan dalam memprediksi *financial distress*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan masukan dan juga sebagai bahan pertimbangan manajemen perusahaan agar lebih berhati-hati lagi dalam mengelola laporan keuangan perusahaan supaya tidak terjadi kegagalan hingga mengalami kebangkrutan.